INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1958-1971

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Wacana Kritis (AWK) terhadap Teks Sejarah Dalam Artikel “Tahanan Politik Wanita di Plantungan”

Nurbaity^{1✉}, Rani Noviyanti², Yeni Handayani³

Pendidika Sejarah, FIPPS, Universitas Indraprasta PGRI

Email: nurbaity_muthalib@yahoo.com^{1✉}

Abstrak

AWK memiliki asumsi dasar bahwa bahasa digunakan untuk beragam fungsi dan bahasa yang memiliki berbagai konsekuensi. Tujuan akhir dari AWK adalah kemajuan ilmiah dan perubahan sosial serta politik. Peneliti AWK diharapkan menjadi agent of change dan mendukung dengan mereka yang membutuhkan perubahan. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai tahanan politik di Plantungan yang mana tahanan politik ini adalah kaum perempuan yang merupakan bagian dari GERWANI. Dalam sejarah Indonesia khususnya di tahun 1965, ada peristiwa yang tidak akan pernah terlupa dan selalu tertulis dan buku-buku teks sejarah di sekolah yaitu Peristiwa Pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965 yang diduga menjadi dalangnya adalah PKI. Salah satu organisasi perempuan yang dibina oleh PKI adalah Gerwani. Dalam artikel dari media social yang ditelaah dengan AWK ini, memperlihatkan bahwa kaum perempuan yang ditangkap kemudian menjadi tahanan politik, mendapatkan perlakuan yang tidak adil baik ketika mereka dalam kamp Plantungan maupun ketika mereka berada dalam kehidupan bermasyarakat di luar kamp. Penelitian ini menggunakan metode AWK milik Fairclough yang memiliki 4 langkah. Beberapa aspek yang ditemukan dalam menganalisis teks dalam artikel Tahanan Politik Wanita di Plantungan antara lain: Plantungan merupakan tempat yang terpencil, tahanan tidak boleh berbaur dengan warga setempat. Jatah makan dan pengobatan sangat buruk, tapol wanita meninggal karena TBC dan kanker. Jenazah tapol ini bahkan tidak diterima keluarga.

Kata Kunci: *Analisis Wacana Kritis (AWK), Teks Sejarah, Tahanan Politik Wanita, Plantungan*

Abstract

AWK has the basic assumption that language is used for various functions and that language has various consequences. The ultimate goal of AWK is scientific progress and social and political change. AWK researchers are expected to be agents of change and support those who need change. In this article we will discuss political prisoners in Plantungan, where these political prisoners are women who are part of GERWANI. In Indonesian history, especially in 1965, there is an event that will never be forgotten and is always written about in history textbooks at school, namely the 30 September Movement Uprising in 1965, which is thought to have been the mastermind behind the PKI. One of the women's organizations fostered by the PKI is Gerwani. In this article from social media reviewed by AWK, it shows that women who were arrested and then became political prisoners received unfair treatment both when they were in the Plantungan camp and when they were in social life outside the camp. This research uses Fairclough's AWK method which has 4 steps. Several aspects found in analyzing the text in the article Women Political Prisoners in Plantungan include: Plantungan is a remote place, prisoners are not allowed to mix with local residents. Food rations and medical treatment were very poor, female political prisoners died of tuberculosis and cancer. The bodies of these political prisoners were not even accepted by their families.

Keywords: *Critical Discourse Analysis (AWK), Historical Texts, Women Political Prisoners, Plantungan*

PENDAHULUAN

Analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis)/AWK adalah suatu metode baru di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan budaya. Dalam pandangan [1] disebutkan bahwa kata "kritis" itu sendiri diartikan ke dalam empat bentuk analisis: pertama, menganalisis hubungan semiosis dan unsur sosial, yaitu bagaimana semiosis menentukan/mereproduksi/mengubah hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dan juga proses ideologisasi; kedua, hubungan itu menuntut analisis karena logika dan dinamika masyarakat tidak selalu transparan, bahkan menyesatkan; ketiga, logika dan dinamika yang dominan perlu diuji, dan ditantang oleh masyarakat. Setelah itu mengidentifikasi kemungkinan untuk mengatasinya; dan yang keempat, mengambil jarak terhadap data, meletakkan data dalam konteksnya, mengklarifikasi posisi politik partisipan, dan fokus pada refleksi diri dalam penelitian.

Begitu pula disebutkan bahwa wacana dilihat sebagai bahasa dalam praksis sosial, atau bahasa yang menjadi peristiwa sosial. Jadi wacana menyediakan bahasa untuk membuat pernyataan (cara untuk merepresentasikan pengetahuan) tentang topik khusus pada periode sejarah tertentu. Analisis Wacana Kritis tertarik pada cara bagaimana bahasa dan wacana digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, termasuk untuk membangun kohesi sosial atau perubahan-perubahan sosial. Wacana merupakan proses semiotik merepresentasikan dunia sosial. Maka obyek AWK sumber data: dokumen, kertas diskusi, perdebatan parlemen, pidato, kartun, film, foto, koran, iklan, atau brosur [1]. asumsi dasar Analisis Wacana Kritis

(AWK) adalah bahwa bahasa digunakan untuk beragam fungsi dan bahasa yang memiliki berbagai konsekuensi. Tujuan akhir dari AWK adalah kemajuan ilmiah dan perubahan sosial serta politik. Peneliti AWK diharapkan menjadi agent of change dan mendukung dengan mereka yang membutuhkan perubahan. AWK memiliki metodenya tersendiri, yang dapat melakukan analisa konteks, menggunakan teknik pengamatan atau wawancara, melakukan analisis partisipatoris, menggunakan informan atau pakar, dan menggunakan metode framing, termasuk metode etnografi [2].

Dalam kajian sejarah, terkait dengan AWK yang bersinggungan dengan aspek bahasa, teks, wacana, dan objek wacana yang berasal dari sumber data, sejarawan cenderung mengajukan tiga pertanyaan, yaitu tentang peristiwa, proses, dan orang-orang di masa lalu, seperti yang dijelaskan oleh Collingwood (1946) [3]. Namun, AWK sendiri merupakan tipe analisis untuk mengungkapkan ideologi, kekuasaan, sikap politik, dan gender dalam wacana. AWK digunakan untuk mengungkapkan ideologi dan kekuasaan yang terdapat dalam bahasa, teks, dan wacana, serta memperjelas hubungan antara penggunaan bahasa dan relasi kekuasaan. Dalam AWK, wacana dipahami sebagai bentuk dari praktik sosial sehingga perludiperhatikan kriteria yang memperhatikan cara pemerolehan kekuasaan politik atau pemerintahan negara yang diusahakan, diuruskan, serta diperjuangkan melalui teks dalam wacana. Oleh karena itu, dalam kajian sejarah, AWK dapat digunakan untuk mengkaji konstruksi dan implikasi wacana dalam konteks sosial dan budaya pada masa lalu.

METODE PENELITIAN

Tulisan dalam artikel ini bertujuan untuk membedah sebuah artikel di portal berita daring dalam koridor analisis wacana kritis (AWK). Artikel di portal berita daring merupakan salah satu bentuk wacana media (media discourse) yang memiliki serangkaian tanda semiotik yang merepresentasikan dunia sosial [4]. Tiga pakar AWK yang sering dijadikan referensi adalah van Dijk, Wodak, dan Fairclough. Mereka sama-sama melihat adanya agenda sosial politik dibalik produksi dan penggunaan wacana, namun cara kerja atau model mereka dalam menafsir dan membedah cukup berbeda. Dalam tulisan ini akan fokus mengaplikasikan metode AWK milik Fairclough.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiga pertanyaan yang menurut [5] adalah tentang peristiwa, proses, dan orang-orang di masa lalu adalah: apa yang terjadi (menemukan fakta), bagaimana hal itu terjadi (penafsiran historis), dan mengapa itu terjadi dengan cara bukti menunjukkan hal itu terjadi. Dalam Collingwood dijelaskan bahwa jenis penjelasan yang diajukan setiap sejarawan secara individu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan menginformasikan persepsi mereka tentang sejarah serta sisa-sisa pengetahuan kesejarahan mereka. Menjelaskan sesuatu berarti mendeskripsikannya (bertindak secara epistemologis dengan menciptakan pengetahuan), dan menjustifikasi keberadaannya (ontologinya) pada waktu dan tempat tertentu (untuk berhubungan dengan kenyataan - metafisik) [6].

Dikembangkan dari R.G. Gagasan Collingwood bahwa sejarawan dapat dengan berguna memerankan kembali pemikiran para agen sejarah, teori tindakan rasional membantu menjelaskan intensionalitas agen dan mengarah ke sejarah rekonstruksi yang mengasumsikan bahwa sejarawan dapat menjelaskan (memberikan cukup bukti dan tingkat empati) mengapa sesuatu yang sangat mungkin terjadi, atau mengapa agen sejarah mengambil tindakan tertentu untuk alasan yang dapat dijelaskan. Dalam praktiknya, menjelaskan alasan tindakan agen sejarah biasanya juga berarti meminta semacam penilaian tentang sifat umum dari perilaku manusia.

Tidak ada sejarawan mengklaim untuk mengatakan kebenaran absolut tentang masa lalu sebagai sejarah. Hal ini tidak mungkin mengingat sifatnya yang berdasarkan bukti dan tidak langsung. Tujuan yang masuk akal dan moderat dari sebagian besar sejarawan adalah untuk menetapkan tingkat kemungkinan yang tinggi bahwa segala sesuatu benar-benar terjadi seperti yang kita katakan dalam narasi kita, dan karenanya maknanya menjadi dapat dibuktikan. Dalam praktiknya para sejarawan berusaha menjelaskan masa lalu dengan menemukan dan menceritakan penyebab sebenarnya dari institusi sosial dan struktur yang melekat dalam masyarakat yang memengaruhi peristiwa, orang, dan proses. Apa yang dimaksudkan dengan penyebab / kausalitas? Collingwood (1946) mengartikannya sebagai pengertian yang dimilikinya tentang hubungan menentukan antara peristiwa, proses dan tindakan orang. Sejarawan cenderung berbicara tentang penyebab primer dan sekunder, dan kondisi yang diperlukan dan memadai untuk kejadian terjadi. Penyebab yang diperlukan ditemukan di sebagian besar kasus yang menghasilkan efek tertentu, sedangkan penyebab yang cukup saja dapat dipertimbangkan untuk peristiwa tertentu. Sebab-akibat lebih rumit karena harus merangkul penjelasan pada tingkat yang berbeda: bahwa tindakan individu-individu, kolektivitas seperti kelas atau kelompok pekerjaan, dan juga praktik sosial ekonomi dan politik skala besar, proses dan struktur.

Teks yang menjadi wacana dalam analisis saya adalah artikel dari portal berita daring liputan6.com yang terbit pada 24 April 2016 yang berjudul "Derita tahanan politik wanita di kamp terisolir Plantungan" yang ditulis oleh F. Nurdiarsih. Artikel ini merupakan ringkasan darisebuah buku yang ditulis oleh Amurwani Dwi Lestariningsih yang terbit pada tahun 2011 yang berjudul Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan. Artikel ini merupakan sebuah ringkasan murni dan bukan sebuah resensi ataupun review dari buku aslinya. Penulis artikel berusaha menghadirkan suasana yang tergambar dalam buku dengan fokus pada kondisi para tahanan dan suasana Plantungan sendiri sebagai tempat pengasingan [7]. Dalam proses analisisnya, saya mengadopsi empat langkah metode AWK yang digagas oleh Fairclough dalam Haryatmoko, yaitu fokus pada ketidakberesan sosial dalam aspek semiotiknya, mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani ketidakberesan sosial, mempertimbangkan apakah tahanan sosial itu membutuhkan ketidakberesan sosial tersebut, dan mengidentifikasi cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Berikut ini dilampirkan teks dari artikel "Derita tahanan politik wanita di kamp terisolir Plantungan":

Liputan6.com, Jakarta Bagaimana sebenarnya kisah hidup para tahanan politik 1965 di Plantungan, Kendal, Jawa Tengah?

Amurwani Dwi Lestariningsih dalam Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan mencatat kebijakan pemindahan para tahanan wanita dari berbagai tempat ke Plantungan didasari niat untuk membina para tahanan. Lebih lanjut, para kader maupun simpatisan PKI dianggap telah dan akan tetap membahayakan kehidupan bangsa, negara, dan Pancasila.

Karena itulah mulai April 1972, dikirimlah para tahanan wanita dari berbagai tempat di seluruh Indonesia ke Plantungan. Di tempat bekas perawatan penderita lepra itu, setidaknya ada 500 orang tahanan wanita. Di antaranya adalah Mia Bustam (istri pelukis S. Sudjojono), Rose Pandanwangi (penyanyi seriosa), Sri Kayati (istri Rewang, anggota Politbiro CCPKI), Salawati Daud (anggota MPRS), Ny D. Susanto (anggota DPRD), dr Sumiyarsi (istri Syarif Caro Peboka, tokoh Pemuda Rakyat), bintang film Dahlia, dan sejumlah tokoh politik wanita lainnya.

Plantungan terletak di kaki Gunung Prahu. Plantungan diapit oleh Gunung Butak dan Kemulan di jajaran pegunungan Dieng yang terkenal dengan belerangnya. Desa Plantungan merupakan daerah perbatasan yang berada di ujung paling selatan Kota Kendal. Tanahnya subur dan udaranya sejuk.

Mia Bustam pernah membandingkan kamp Plantungan dengan penjara sebelumnya tempat ia ditahan. Mia menuliskan, "Aku segera merasa sreg di tempat itu (kamp

Plantungan). Hawa segar, pemandangan indah pada pagi hari, dari lereng pegunungan, terdengar suara ayam hutan. Sama-sama ditahan, tempat ini jauh lebih menyenangkan, juga lebih sehat daripada penjara yang serba tertutup.”

Meski demikian, Plantungan adalah tempat yang terpencil dan terisolasi. Para tahanan politik hidup serba terkekang dan terbatas. Mereka tidak boleh membaur dengan warga setempat. Pengawasan para penjaga terhadap kegiatan mereka juga sangat ketat. Segala sesuatunya begitu minim dan buruk.

Bangunan kamp Plantungan itu sendiri sudah tua. Setiap bloknya berbentuk empat persegi panjang dengan dinding tembok dan atap terbuat dari semen. Lantainya dari plesteran semen. Wilayah Plantungan yang dikelilingi hutan juga membuat bahaya akan serangan ular sewaktu-waktu bisa terjadi.

Dokter Sumiyarsi, salah satu tahanan politik, menuturkan di kamp itu mereka makan dengan dijatah dan pengobatan begitu jelek. Sampai-sampai pada 1975 ada dua orang pasien yang meninggal di kamp karena tak bisa tertangani. Pasien yang ditangani dokter Sumiyarsi itu adalah Ibu Rini yang menderita kanker usus dan Ibu Sastro yang menderita TBC.

Malangnya, ucap dr Sumiyarsi, jenazah Ibu Rini tidak diterima keluarga karena dia dianggap atau dituduh terlibat Peristiwa PKI/1965. Maka, jenazah Ibu Rini dimakamkan di kompleks pemakaman dekat kuburan Belanda, di sebelah kanan kompleks Plantungan menuju arah bukit.

Sepi dan Putus Asa di Plantungan. Di Plantungan inilah timbul perasaan sepi dan putus asa karena para tahanan politik dijauhkan dari keluarga dan masyarakat. Kebebasan yang dirampas, hak asasi yang direnggut, kebebasan yang hilang dengan stempel tahanan politik membuat mereka sangat menderita. Saat itu mereka benar-benar tidak tahu kapan mereka akan dibebaskan. Secara psikologis para tahanan wanita ini hidup dalam perasaan yang sangat tertekan.

Heryani Busono mengingat masa-masa itu dengan mata yang menerawang dan suara yang bergetar. “Benar-benar terkurung tubuh saya,” katanya Kamis, 21 April 2016.

Untuk melampiaskan rasa rindu pada anaknya, di kamp itu Heryani membuat nyanyian berjudul “Lagu untuk Anakku.” Ia yang menulis liriknya, sementara notasinya digubah oleh Djuwita. Lagu itu ditulisnya dengan bantuannya penjaga asrama tahanan politik di Plantungan.

Heryani memang bersahabat dengan penjaga tahanan karena waktu itu ia menjadi ketua blok. Ia bertugas menjadi penghubung antara petugas dan para tahanan politik.

Lagu itu dibuatnya sebagai doa agar kedua anaknya tidak merasakan nasib yang sama

seperti dirinya. Meski demikian, setelah dibebaskan pada 1978, Heryani menyadari bahwa tak semua orang diberi kepercayaan mengalami masa lalu seperti ini. Ia berjuang keras membuktikan dirinya bukan pembunuh sesama, hingga kepercayaan masyarakat akhirnya didapat. "Saya sekarang menikmati masa tua saya dengan menjadi guru les privat bahasa Inggris. Benar saya adalah tahanan politik. Tidak setiap manusia dipercaya seperti saya untuk menapaki jalan derita," katanya menegaskan.

Identifikasi Ketidakberesan Sosial

Ketidakberesan sosial yang saya observasi dari artikel ini setidaknya ada dua, yaitu:

- a. Adanya stigma terhadap eks tahanan politik wanita yang dianggap mengancam keamanan dan ideologi negara
- b. Eks tahanan politik wanita diperlakukan tidak manusiawi dan tidak mendapatkan hak asasi sebagaimana warga negara lainnya.

Keduanya tersurat dan tersirat dalam penggunaan aspek-aspek linguistik mikro oleh penulisnya. Dimensi pertama AWK Fairclough adalah analisis pada level mikro (2010). Dalam level ini analisis mempertimbangkan berbagai aspek analisis tekstual dengan segala tanda linguistiknya. Analisis berikut akan mulai dari pembahasan mengenai judul dan kemudian diikuti oleh pembahasan beberapa paragraf yang menggambarkan ketidakberesan sosial yang disebut di bagian sebelumnya.

Judul artikel liputan6.com ini adalah "Derita Tahanan Politik Wanita di Kamp Terisolir Plantungan" yang kurang lebih mirip dengan judul buku sumbernya yaitu Gerwani: Derita Tapol Wanita di Kamp Plantungan. Baik penulis buku maupun penulis artikel menggunakan kata 'derita' dan 'kamp' untuk menekankan perlakuan yang diterima para tapol wanita. Penggunaan istilah 'kamp' sebenarnya kurang lazim dalam konstruksi sejarah Indonesia. Kita mungkin lebih mengenal istilah 'tempat pengasingan' atau 'tempat pembuangan' untuk merepresentasikan tempat selain penjara yang dipakai sebagai tempat hukuman. Penggunaan istilah 'kamp' bisa ditarik asosiasinya dengan kamp Auschwitz di Polandia yang merupakan kamp konsentrasi yang dibangun oleh Nazi Jerman yang erat kaitannya dengan peristiwa Holocaust. Tampaknya baik penulis artikel maupun penulis buku ingin mengkonstruksi pengalaman transnasional agar apa yang dialami para tahanan politik ini dapat direkognisi secara global. Lebih lanjut, dalam judulnya penulis artikel tidak menggunakan istilah Gerwani, sebuah bentuk kehati-hatian karena bahkan sampai sekarang pun istilah ini masih berstigma negatif dan bahkan dianggap berbahaya. Portal berita daring yang mengandalkan setiap click dari pembaca untuk mendorong iklan harus berhati-hati dengan redaksi judul. Hal ini berbeda dengan judul buku sumbernya.

Lestariningsih sebagai seorang peneliti dan sejarawan yang bertugas di Kemendikbud memiliki otoritas ilmiah untuk menggunakan istilah ini.

Analisis tekstual selanjutnya adalah untuk paragraf 3 berikut ini:

Plantungan terletak di kaki Gunung Prah. Plantungan diapit oleh Gunung Butak dan Kemulan di jajaran pegunungan Dieng yang terkenal dengan belerangnya. Desa Plantungan merupakan daerah perbatasan yang berada di ujung paling selatan Kota Kendal. Tanahnya subur dan udaranya sejuk. Deskripsi geografis dalam paragraf 3 memberikan kesan utopis untuk sebuah tempat hukuman. Penggunaan kata sifat 'subur' dan 'sejuk' memberikan harapan bagi pembaca akan perlakuan baik yang mungkin diterima para tahanan politik wanita di Plantungan. Bahkan di paragraf 4, salah satu tahanan, Mia Bustam menyatakan kesan baiknya terhadap tempat tersebut: "Aku segera merasa sreg di tempat itu (kamp Plantungan). Hawa segar, pemandangan indah pada pagi hari, dari lereng pegunungan, terdengar suara ayam hutan. Sama-sama ditahan, tempat ini jauh lebih menyenangkan, juga lebih sehat daripada penjara yang serba tertutup." Namun kesan ini segera terbantahkan oleh deskripsi yang ada di paragraf 5 berikut ini.

Meski demikian, Plantungan adalah tempat yang terpencil dan terisolasi. Para tahanan politik hidup serba terkekang dan terbatas. Mereka tidak boleh membaur dengan warga setempat. Pengawasan para penjaga terhadap kegiatan mereka juga sangat ketat. Segala sesuatunya begitu minim dan buruk. Paragraf 5 menjadi juksta posisi yang kontras dengan paragraf 3 dan 4. Kata-kata sifat yang secara semantis mengarah ke kesan distopian banyak muncul di sini. Penulis menggunakan istilah 'terpencil,' 'terisolasi,' 'terkekang,' 'terbatas,' 'minim,' dan 'buruk.' Semuanya mengarah pada konstruksi 'derita' yang dipakai penulis di judul artikel dan buku. Di paragraf 5 juga tertulis 'mereka tidak boleh membaur dengan warga setempat,' sebuah pernyataan yang menggambarkan perlakuan rezim yang berkuasa pada waktu itu yang menstigmatisasi tahanan eks-Gerwani ini sebagai musuh negara yang tidak punya kesempatan yang sama dengan warga negara lain. Pernyataan 'pengawasan para penjaga terhadap kegiatan mereka juga sangat ketat' menunjukkan posisi mereka yang dianggap sebagai ancaman.

Dalam paragraf 7 berikut, penulis menceritakan perlakuan tidak manusiawi yang diterima oleh para tahanan wanita yang sakit. Beberapa tahanan bahkan dibiarkan meninggal karena fasilitas kesehatan yang buruk. Dokter Sumiyarsi, salah satu tahanan politik, menuturkan di kamp itu mereka makan dengan dijatah dan pengobatan begitu jelek. Sampai-sampai pada 1975 ada dua orang pasien yang meninggal di kamp karena tak bisa tertangani. Pasien yang ditangani dokter Sumiyarsi itu adalah Ibu Rini yang menderita kanker usus dan Ibu Sastro yang menderita TBC.

Stigmatisasi negatif dari rezim yang berkuasa juga menyebabkan keluarga tahanan bahkan tidak mau menerima jenazah mereka seperti yang tergambar di paragraf 8 berikut:

Identifikasi Hambatan-hambatan untuk Menangani Ketidakberesan Sosial

Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia pernah mengalami masa yang paling kelam yakni ketika terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965. Dalam peristiwa itu PKI dituduh menjadi dalang dari pembunuhan para jenderal yang dikatakan akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Setelah Orde Baru dibawah tampuk kepemimpinan Soeharto menggantikan Soekarno. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Soeharto di era Orde Baru adalah membasmi komunis dalam hal ini adalah PKI beserta ormas-ormasnya. Ormas-ormas yang merupakan underbouw PKI antara lain pemuda rakyat, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Barisan Tani Indonesia (BTI) yang pada awalnya ormas-ormas itu bukanlah organisasi massa PKI.

Kebijakan Orde Baru terhadap PKI, dalam sejarah Indonesia terjadi pembunuhan massal tahun 1965 dan 1966. Pada peristiwa itu angkatan bersenjata pimpinan Soeharto membantu mengkoordinir pembantaian hampir satu juta manusia. Pasca peristiwa itu dan banyaknya tahanan politik yang diduga terkait PKI, pemerintah Orba berusaha mencari solusi akhir bagi masalah administrasi dan keamanannya yang tak kunjung selesai, yaitu masalah para narapidana politik [8]. Dalam Ricklefs dinyatakan bahwa di seluruh nusantara, penjara-penjara penuh sesak dengan orang yang ditahan tanpa pemeriksaan pengadilan sejak tahun 1965. Pada akhir tahun 1977, Amnesty Internasional memperkirakan narapidana politik Indonesia berjumlah antara 55.000 dan 100.000 orang Apakah Tatanan Sosial itu Membutuhkan Ketidakberesan Sosial Tersebut?

Berdasarkan analisis yang kami lakukan, saya melihat bahwa: Tatanan sosial di masa Orde Baru menghendaki stigmatisasi negatif terhadap para tahanan politik yang terkait PKI untuk melepaskan bayangan kekuasaan Orde Lama dan melanggengkan kekuasaan Soeharto di masa Orde Baru.

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 merupakan peristiwa yang paling kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa yang tidak hanya mencekam pada tanggal tersebut, tetapi juga mencekam dan semakin memanas setelahnya. Kekuasaan Orde Lama yang dipegang oleh Soekarno direbut oleh Soeharto. Dalam Ricklefs dipaparkan bahwa kala itu, Soekarno meremehkan kehebatan pesaingnya, yaitu Soeharto. Selama beberapa bulan setelah peristiwa tahun 1965 itu, Soekarno berusaha membuktikan bahwa usaha kudeta hanya merupakan insiden kecil dalam proses revolusi yang bergulir dan Soekarno lah yang berkuasa. Tetapi, Soeharto membuktikan dirinya sebagai lawan yang tangguh dan mampu

menaklukkan Soekarno yang sudah tua, sakit, dan selalu membesarkan-besarkan diri. Strategi yang dilakukan oleh Soeharto ternyata berhasil dan sang presiden akhirnya kalah menghadapi penggantinya, dan bersama itu pula visinya tentang revolusi ikut hilang. Ketika para jenderal korban gerakan 30 September 1965 dimakamkan pada hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965, tentara yang merupakan pesaing berat PKI mulai secara terang-terangan menyalahkan PKI yang melakukan usaha kudeta yang kini disebut Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) dengan menyindir jelas pada Gestapo Nazi Jerman. Selanjutnya PKI melakukan bantahan atas keterlibatannya dalam pembunuhan itu tetapi sama sekali tidak dihiraukan [9].

Soeharto yang didukung tentara, juga merangkul kaum pemuda dalam memberangus PKI. Keterlibatan pemuda yang membenci PKI sebagai pendukung kekuasaan Soekarno juga dengan jelas dipaparkan oleh Ricklefs. Pada tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 10 Januari 1966, dimulailah aksi-aksi mahasiswa yang dipelopori oleh KAMI yang melanda hampir di seluruh jalan ibukota selama lebih kurang 60 hari. Mereka menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang salah satu tuntutan terpenting adalah Bubarkan PKI! [10].

Pada bulan Oktober 1965, pembunuhan terhadap orang-orang yang terkait dengan PKI mulai dilakukan. Kekerasan terhadap PKI dan yang terkait dengan PKI baik organisasi onderbouwnya atau keturunannya terjadi di seluruh daerah, dan yang paling buruk terjadi di Jawadana Bali. Berdasarkan catatan Ricklef, konflik di Jawa Timur antara PKI dan NU yang telah dimulai pada tahun 1963 berubah menjadi pembunuhan massal secara menyeluruh yang dimulai dari minggu kedua bulan Oktober 1965. Pada pertengahan bulan Oktober 1965, Soeharto mengirim satuan-satuan prajurit penyerang yang terpercaya ke Jawa Tengah.

Identifikasi Cara-cara yang Mungkin untuk Mengatasi Hambatan-hambatan Tersebut
Cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain:

Derita yang harus diterima oleh eks tapol Gerwani selama dalam tahanan maupun setelah mereka bebas sangatlah berat. Sebenarnya hal itu dimungkinkan untuk tidak terjadi jikalau pemerintah melakukan penyelidikan terlebih dahulu pada eks Gerwani apakah mereka betul-betul melakukan kejahatan yang dituduhkan.

Berdasarkan tayangan BBC News Indonesia di kanal Youtube pada tanggal 28 september 2021, dua orang eks tapol Gerwani yang ditahan di kamp Plantungan diwawancarai. Keduanya menyebutkan kala itu mereka masih berusia belia ketika masuk dalam organisasi Gerwani. Keduanya mengaku sebatas mengikuti saja organisasi tersebut, mereka mengikuti kegiatan di organisasi itu salah satunya menari. Mereka menceritakan hanya ikut-ikutan saja dalam Gerwani itu. Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 terjadi, mereka ikut ditangkap. Dalam penuturan mereka, mereka bingung telah berbuat

kesalahan yang melanggar hukum seperti apa? Selama mereka dalam kamp Plantungan, masyarakat sekitar kamp itu menyebut mereka sebagai 'bekas PKI'. Mereka hanya pasrah saja mendapat sebutan tersebut. Setelah mereka bebas dari kamp Plantungan, ada masyarakat yang bisa menerima kehadiran mereka dan ada juga yang masih belum bisa menerima mereka. Dalam penuturan mereka mereka sangat berharap agar pemerintah mengupayakan nama baik mereka bisa pulih, stigma sebagai 'bekas PKI' sudah tidak melekat lagi dalam diri mereka. Tetapi mereka pun juga menyatakan jika stigma itu belum bisa hilang, mereka hanya bisa pasrah.

Gerwani pada awalnya adalah organisasi wanita dengan nama Gerakan wanita Sedar. Dari awal terbentuknya organisasi ini memiliki tujuan untuk kemajuan kaum wanita. Hal-hal yang dilakukan dalam organisasi ini adalah memberikan keterampilan bagi wanita, mengajarkan para kaum wanita agar bisa membaca (memberantas buta huruf bagi kaum wanita) dan pengetahuan mengenai rumah tangga. Pada tahun 1964, terdapat kebijakan politik Soekarno yang menyatakan segala organisasi massa harus berafiliasi dengan partai politik yang ada pada saat itu. Selanjutnya organisasi wanita ini menyatakan bergabung dengan PKI dan menjadi organisasi onderbouw PKI. Gerwani ini begitu aktif dalam mengangkat isu-isu baik nasional maupun internasional. Dengan keaktifan Gerwani sebagai organisasi wanita, membuat peran wanita yang terlibat dalam aspek social dan politik dipandang penting hingga keterwakilan dari para wanita ditempatkan dalam parlemen untuk menyampaikan aspirasi yang terkait dengan hak-hak wanita. Afiliasi Gerwani dengan PKI, membuat para anggota Gerwani banyak yang ditangkap setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, secara paksa dan tanpa proses peradilan. Hingga akhirnya para tahanan ini sampai ke kamp Plantungan, alih-alih sebagai tempat rehabilitasi para tapol tetapi kenyataannya para tapol ini hidup menderita.

Diharapkan ada itikad baik dari pemerintah apabila terbukti melalui penyelidikan dan penelitian bahwa ada pembunuhan, penyiksaan secara massal dan penangkapan secara paksa tanpa proses peradilan sejatinya pemerintah menyatakan permintaan maaf kepada para tapol dan keturunannya yang dianggap terlibat dalam peristiwa September 1965

Permintaan maaf secara perseorangan tentu sangat berbeda ketika permintaan maaf disampaikan oleh pemerintah. Keberanian meminta maaf dari pemerintah atas suatu peristiwa tertentu memiliki dampak politis yang begitu besar. Dalam hal ini pemerintah Indonesia masih belum bisa menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa Gerakan 30 September 1965 kepada pihak yang terkait dengan PKI dan selalu memandang bahwa kejadian tersebut adalah perbuatan dari PKI. Hal itu lah yang menyebabkan proses rekonsiliasi begitu sulit terwujud apalagi luka atas peristiwa ini selalu dibuka terus-menerus

seperti menjadi sebuah ritual setiap tahun di bulan September.

Pemerintah juga mengembalikan atau membersihkan nama baik mereka serta menyerahkan ahli waris atas apa yang telah ditinggal mereka untuk keturunan mereka.

Para tapol yang ditempatkan di kamp yang jauh, sepi, terpencil, wilayah yang berhutan- hutan membuat para tapol harus mandiri dengan membuka hutan dan mengelola hutan tersebut menjadi lahan perkebunan atau pertanian yang produktif. Setelah bertahun-tahun lahan itu dikelola kemudian banyak menghasilkan produksi pertanian, akhirnya tanah tersebut dimiliki oleh para tapol. Permintaan para tapol ini setelah mereka bebas adalah tanah yang berhasil mereka kelola , mereka minta untuk dikembalikan kepada keturunan tapol tersebut.

Penyematan stigma yang buruk pada tapol dan berimbas pada anak keturunannya , pernah juga dirasakan salah satu contohnya Ribka Tjiptaning yang sekarang menjadi anggota DPR. Hal yang dilakukan oleh Ribka salah satunya menulis buku yang berjudul "Aku Bangga Menjadi Anak PKI". Buku tersebut setelah ditelaah tidak bermuatan untuk menyebarkan paham komunis ,tetapi buku tersebut lebih menceritakan tentang Ribka sendiri yang perjalanan hidupnya sangat berat ketika mendapat stigma yang buruk karena ayahnya adalah bagian dari anggota PKI. Ribka berusaha melepaskan stigma itu yang kemudian ia tergabung dalam suatu partai yang ia ikuti dari menjadi anggota biasa hingga akhirnya ia menjabat sebagai anggota DPR saat ini.

Begitu berat perjuangan para tapol setelah mereka bebas untuk mengembalikan lagi namabaik mereka dari stigma sebagai PKI. Tetapi masa telah berubah, ada masyarakat yang sudah bisa menerima tapol ini dan keluarganya tapi masih ada juga yang belum bisa menerima. Masa reformasi telah bergulir dan banyak perubahan yang terjadi pada segala aspek kehidupan bangsaIndonesia.. Hal itu sangat penting sebagai lambang dari kebebasan berpolitik di Indonesia. Salah satu tokoh sejarawan Indonesia dari LIPI yang bernama Asvi Warman Adam menyatakan bahwa , saat ini buku-buku sejarah untuk anak sekolah tidak boleh lagi menyebutkan peristiwa gerakan 30September 1965 sebagai G 30 S/PKI tetapi G 30 S tanpa kata PKI karena dari beberapa bukti sejarahperistiwa tersebut disebutkan bahwa tidak didalangi oleh PKI semata. Oleh karena itu butuh penelitian lebih lanjut untuk membuktikan perspektif lain di luar PKI sebagai dalang dari peristiwa Gerakan 30 September 1965.

SIMPULAN

Wacana (discourse) merupakan praksis sosial dalam bentuk interaksi simbolis dalam berbagai bentuk (pembicaraan, tulisan, kial, gambar, diagram, film atau music). Analisis Wacana Kritis menelaah bagaimana bahasa dan wacana digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, membangun koheisi sosial atau menilik perubahan-perubahan sosial. Wacana merupakan proses semiotik yang merepresentasikan dunia sosial. Empat langkah metode AWK menurut Fairclough, antara lain: Pertama, fokus pada ketidakberesan sosial dalam aspek semiotiknya, kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani ketidakberesan social, ketiga, mempertimbangkan apakah tatanan sosial itu membutuhkan ketidakberesan sosial tersebut dan keempat, Mengidentifikasi cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan. Dalam artikel dari media sosial yang dibahas baik penulis buku maupun penulis artikel menggunakan kata 'derita' dan 'kamp' untuk menekankan perlakuan yang diterima para tapol wanita (diasosiasikan dengan kamp Auschwitz). Penulis artikel juga tidak menggunakan istilah Gerwani, yang masih berstigma negative dan bahkan dianggap berbahaya sampai sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- J. Haryatmoko, "Kondisi Ideologis dan Derajat Keteramalan," *DISKURSUS-JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA*, vol. 14, no. 2, pp. 153–192, 2015.
- Y. A. Darma, *Analisis wacana kritis*. Yrama Widya bekerja sama dengan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra ..., 2009.
- R. Noverino, "A Bathtub Of Popcorn: Kajian Analisis Wacana Kritis Buku Cerita Anak Dwi Bahasa," *PRASASTI: Journal of Linguistics*, vol. 4, no. 1, 2016.
- M. Bloor and T. Bloor, *The practice of critical discourse analysis: An introduction*. Routledge, 2013.
- R. G. Collingwood, *The idea of history*. Oxford University Press, 1993.
- P. Johnson, "Collingwood's the Idea of History," *Collingwood's The Idea of History*, pp. 1–208, 2012.
- A. D. (2011) *Lestariningsih, Gerwani: kisah tapol wanita di Kamp Plantungan*. PT Gramedia Pustaka Utama. PT Gramedia Pustaka Utama. , 2011.
- J. A. (1999). Winters, "Dosa-Dosa Politik Orde Baru (Political Sins of the [Suharto] New Order): A collection of articles on Indonesian political economy.," *A collection of articles on Indonesian political economy.*, 1999.
- M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Penerbit Serambi. Penerbit Serambi.,

2008. Accessed: Jan. 03, 2024. [Online]. Available:
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=uk-Edtb-m6kC&oi=fnd&pg=PA327&dq=Ricklefs,+M.C.+\(2008\).+Sejarah+Indonesia+Modern+12002004.+Jakarta:+Serambi.+&ots=QMRRSii2BR&sig=kuL7CoVRLiUF90UiquagyrKrvUw&redir_e sc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=uk-Edtb-m6kC&oi=fnd&pg=PA327&dq=Ricklefs,+M.C.+(2008).+Sejarah+Indonesia+Modern+12002004.+Jakarta:+Serambi.+&ots=QMRRSii2BR&sig=kuL7CoVRLiUF90UiquagyrKrvUw&redir_e sc=y#v=onepage&q&f=false)

M. D. dan N. N. (ed). Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.